



Judul : Kapan Papua bisa aman dan damai
Tanggal : Minggu, 24 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Aksi KKB Sudah Brutal Kapan Papua Bisa Aman Dan Damai

ANGGOTA Komisi I DPR Sukamta mengecam aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sehingga menewaskan 10 orang warga di Nogolait, Nduga, Papua, beberapa waktu lalu. Aksi KKB ini sudah tergolong brutal.

"Kami mengecam tindakan KKB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini segera dihentikan," tegasnya, kemarin.

Dia pun meminta TNI-Polri segera memberantas aksi teroris KKB ini, sehingga tidak meluas dan semakin meresahkan masyarakat.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan aparat untuk meredam KKB. Salah satunya mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini.

"Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya," tegasnya.

Namun, dia mewanti, proses penegakan hukum terhadap KKB harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran. Dan tidak kalah penting, TNI-Polri juga perlu melakukan perang opini publik.

Menurutnya, setidaknya ada 9 kelompok teroris KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sedangkan KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.

"Langkah-langkah pemetaan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus di-

lakukan, sehingga tidak muncul anggota-anggota baru," katanya.

Anggota DPD Filep Wamafma berharap, ada langkah konkret yang diambil Pemerintah segera menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua.

Konflik berkepanjangan ini telah membuat masyarakat Papua menderita dan terus hidup dalam kekhawatiran.

"Peristiwa ini sudah tidak bisa lagi dipandang enteng dan dibiarkan begitu saja. Warga sipil tidak patut menjadi korban atas kepentingan apapun," tegas Filep.

Filep bilang, konflik berkepanjangan ini telah berlarut-larut dan mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuh terutama dari kalangan warga sipil.

Sebagai Senator, pihaknya telah berulang kali menyampaikan cara-cara penyelesaian konflik bersenjata di Papua kepada Pemerintah, namun belum mendapat respons yang baik.

"Kami sebenarnya sudah seringkali menyampaikan masukan dan saran. Namun pandangan-pandangan dan hasil-hasil rapat terkait Papua tidak diindahkan oleh Pemerintah," ungkapnya.

Senator asal Papua Barat ini memandang, belum ada konsep yang menyeluruh untuk menciptakan Papua benar-benar sebagai kawasan damai tanpa konflik bersenjata.

Dia meminta, rekomendasi DPD terhadap penyelesaian kekerasan di Papua melalui jalan dialog atau rekonsiliasi dilaksanakan. ■ KAL